RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PASAMAN BARAT

TUAH BASAMO

TAHUN

2006 - 2010

SIMPANG EMPAT JULI 2006

KATA PENGANTAR

Renstra Dinas Kehutanan ini disusun guna memenuhi maksud surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 059/110E/Bappeda/VI-2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Penyusunan Draf Renstra SKPD dan diperbaiki setelah kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja SKPD bagi Dinas / instansi sekabupaten Pasaman Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 Juli 2006 bertempat di Balai Diklat Pertanian jalan Padang – Indarung km 8 Padang. Adapun isi Renstra ini meliputi :

1 BAB I PENDAHULUAN
2 BAB II GAMBARAN UMUM
3 BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI
4 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
5 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
6 BAB VI PENUTUP

Penyusunan Renstra ini disadari masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan disebabkan keterbatasan berbagai hal, untuk itu diharapkan kritikan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan dan memberikan masukan diucapkan terimaksih.

Simpang Empat, September 2006
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten. Pasaman Barat

Drs.H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Kabupaten baru sampai saat ini belum banyak teridentifikasi persoalan berkaitan dengan kerusakan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Namum bukan berarti tidak akan merasakan dampak kerusakan sumber daya alam tersebut bila tidak hati-hati dalam pengelolaannya.

Permasalahan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara nasional antara lain adalah kerusakan hutan, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), kerusakan ekosistim laut dan wilayah pesisir, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan dan belum harmonisnya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Perkembangan perkebunan yang begitu pesat bila tidak di tangani dengan hati-hati dan tanpa diiringi dengan konservasi lahan, akan memberi peluang untuk terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Saat ini sudah ada 13 perusahaan perkebunan besar yng beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat. Demikian juga dengan Pesisir Pantai, laut beserta pulau-pulau kecil yang dimilikinya menyimpan kekayaan alam yang luar biasa untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Namum bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi bencana dibelakang hari.

Rencana strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat adalah perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan kehutanan yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinerji dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rencana strategis ini akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan dalam Program dan kegiatan tahun 2006 - 2010

Pembangunan Kehutanan yang dilaksanakan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan, tujuan yang akan dicapai dari pembangunan kehutanan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan khususnya masyarakat Pasaman Barat pada umumnya dengan menjaga kelestarian hutan dan keseimbangannya dengan lingkungan hidup.

Penyusunan RENSTRA ini mempedomani RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 - 2010, merupakan perencanaan yang harus memberikan arahan untuk memudahkan pencapaian tujuan secara terukur dengan proses berkelanjutan.

2. DASAR PENYUSUNAN

Pelaksanaan pembangunan di sektor kehutanan yang tertuang dalam Renstra 2006-2010.

Dasar Penyusunannya :

1 Undang – Undang No.32 tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Mentri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
3. Perda No. 03 tahun 2005 tentang SOTK Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 14 tahun 2005 tentang Tupoksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang berbunyi antara lain :
   a. Mengurus kebijakan teknis dibidang kehutanan
   b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum
   c. Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas
5. Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2006 di bidang kehutanan antara lain :
   1. Peningkatan keberhasilan Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan
   2. Peningkatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
   3. Penurunan aktifitas Illegal Logging
   4. Pemantapan Kawasan Hutan
   5. Peningkatan tertib izin pengelolaan hutan dan hasil hutan
   6. Peningkatan Pembinaan Perizinan
   7. Peningkatan kemampuan SDM dibidang kehutanan
   8. Peningkatan Sarana dan Prasarana
6. Lima prioritas kebijakan Departemen Kehutanan Republik Indonesia tahun 2004 yaitu :
   - Pemberantasan Penebangan Liar (Ilegal Logging)
   - Penanggulangan Kebakaran Hutan
   - Restrukturisasi Sektor Kehutanan
   - Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan (SDH)
   - Penguatan Desentralisasi Kehutanan

Selain mempedomani Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat juga mempedomani RENSTRA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.

3. POLA PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT

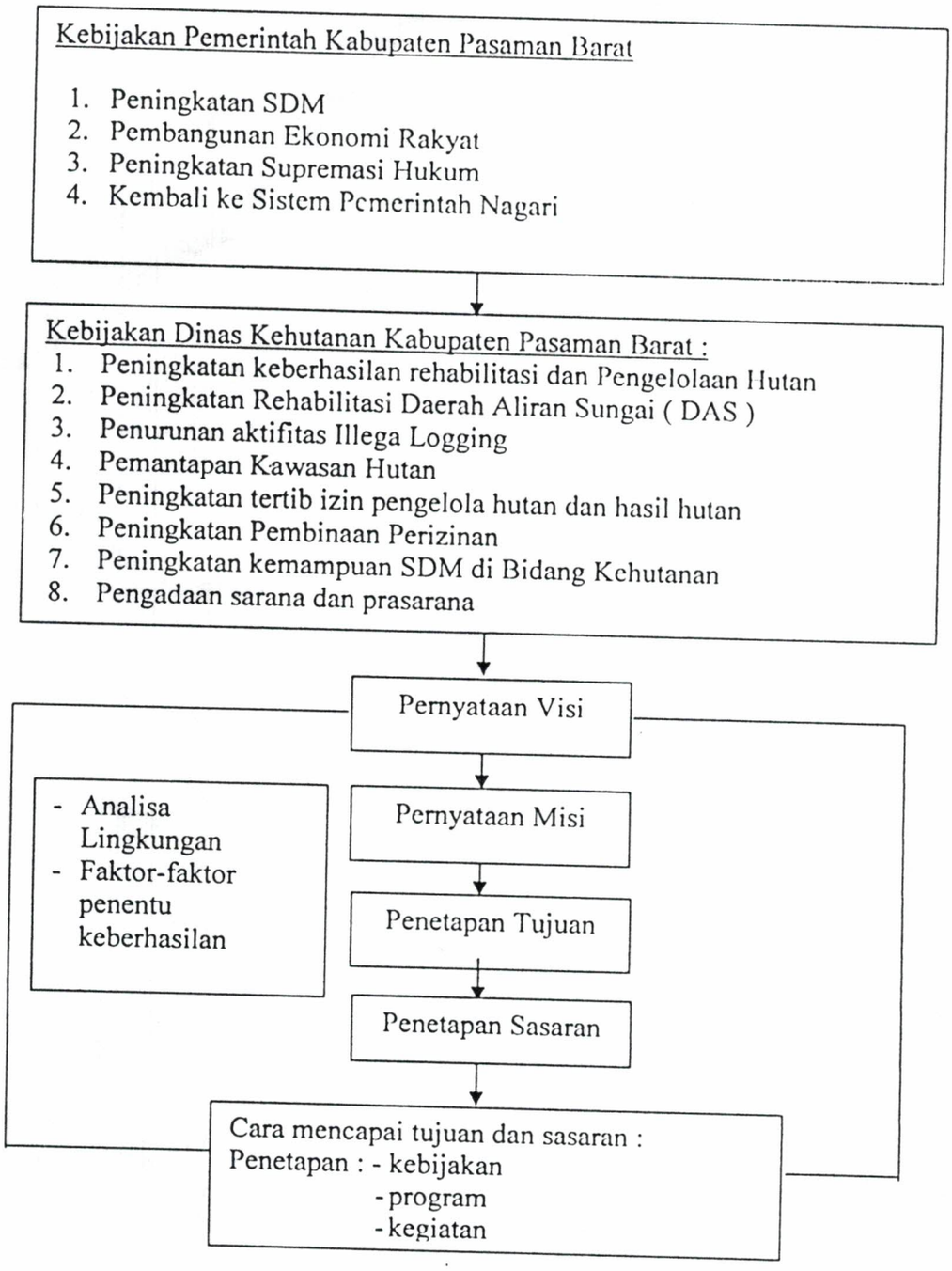

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KEADAAN GEOGRAFIS

Pasaman Barat memiliki luas wilayah ± 388.777 Ha dengan topografi datar dan landai beriklim panas. Ketinggian bervariasi dari 0 meter sampai 450 m dari permukaan laut. Gunung tertinggi Sumatera Barat terdapat di Kabupaten kita yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 m dari permukaan laut.

Kabupaten Pasaman Barat dilintasi oleh garis khatulistiwa secara administrasi mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatas dengan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
- Bagian Timur berbatas dengan Kabupaten Pasaman
- Bagiang Selatan berbatas dengan Kabupaten Agam
- Bagian Barat berbatas dengan Samudra Indonesia

Pasaman Barat merupakan kabupaten paling barat dari Propinsi Sumatera Barat, secara keseluruhan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 kecamatan, 19 nagari dan 202 jorong dengan panjang pantai lebih kurang 150 Km.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Pasaman masih banyak kekurangan tenaga teknis maupun administratif yang handal. Sungguhpun dibandingkan jumlah personil pada tahun 2005 dengan jumlah personil ditahun 2006 dari segi kwantitatif memang lebih banyak tapi dari segi kwalitatif tetap masih kurang. Adapun perbandingan keberadaan personil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005 dengan personil yang ada pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		POLHUT		HONORER		SUKARELA		JUMLAH	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	SLTP	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	SLTA	9	8	-	12	8	8	4	12	21	40
3	Akademi	1	1	-	-			1	1	2	2
4	S.1	7	11	-	-	4	4	4	6	15	21
	Total	18	21	-	12	12	12	9	19	42	64

Indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningktan dari 61,72 pada tahun 2003 menjadi 62,84 pada tahun 2004.

Dinas kehutanan sebagai unit pelaksana teknis daerah terdiri dari satu Bagian Tata Usaha, empat bidang lainnya yaitu : Bidang Program, Bidang Bina Hutan, Bidang Peredaran Hasil Hutan, Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang kesemuanya ini membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan serta menyusun program kerja di bidang kehutanan. Sasaran pembangunan kehutanan yang perlu mendapat perhatian besar diantaranya :

- Pengurangan lahan kritis
- Pemantapan kawasan hutan
- Penurunan illegal logging

Penanggulangan lahan kritis telah dimulai dari tahun 2005 dan 2006 dengan adanya Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam (tahun 2006) yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :

a. Pelatihan Petani Sekitar Hutan
b. Pembuatan Bibit Kehutanan
c. Pendamping Rehabilitasi Hutan dan Lahan
d. Pembuatan Tanaman Reboisasi 250 ha
f. Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 200 ha
g. Penyusunan Rancang Teknik Hutan Reboisasi tahun 2005 250 ha
h. Penyusunan Rancang Teknik Hutan Rakyat tahun 2005 200 ha
i. Penyusunan Rancang Teknik Reboisasi tahun 2006 500 ha
y. Penyusunan Rancang Teknik Hutan Rakyat tahun 2006 500 ha

Sebahagian sudah terlaksana secara bertahap. Sedangkan upaya untuk pemantapan kawasan hutan ditahun 2005 ada tiga (3) kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
2. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan
3. Orientasi Batas Kawasan Hutan

Ketiga kegiatan ini tidak terlaksana karena dananya dialihkan ke Pendamping Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan di tahun 2006 ada dua (2) kegiatan untuk pemantapan kawasan hutan yakni :

1. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan
2. Survey Potensi Kawasan Hutan Pantai

Kedua kegiatan ini terlaksana dengan baik secara bertahap.

Dalam melaksanakan pembangunan kehutanan pada saat ini dan kedepan mendapat tantangan yang harus segera dicarikan pemecahaanya. Adapun tantangan dimaksud adalah :

1. Kebutuhan kayu untuk Pasaman Barat sangat mendesak sedangkan dilain pihak ketersedian kayu yang berasal dari izin Legal tidak ada
2. Kebutuhan Lahan untuk pembangunan di luar kehutanan sangat dibutuhkan, dilain pihak ketersedian lahan diluar kawasan hutan tidak memungkinkan lagi
3. Sumber Daya Alam berupa bahan tambang sangat potensi terdapat di Pasaman Barat, dilain pihak lokasi bahan tambang tersebut sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung.
4. Masyarakat adat mengakui sebagian kawasan hutan tanah ulayat mereka, dilain pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan kawasan hutan dikuasi oleh negara.
5. Sebahagian besar daerah aliran sungai (DAS) sudah beralih menjadi kawasan non kehutanan, dilain pihak berdasarkan peraturan 100 m kiri dan 100 m kanan sungai adalah kawasan hutan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan ada beberapa tugas pokok yang perlu diterapkan, membantu Kepala Daerah dan melaksanakan Pemerintahan Daerah di bidang kehutanan meliputi : Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Daerah serta menyusun Program Kerja dibidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas. Instansi Dinas Kehutanan harus memberi data informasi mengenai situasi kehutanan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kehutanan, memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kehutanan serta pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Kemudian fungsi Dinas Kehutanan terhadap pembangunan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Penyusunan kebijaksanaan kegiatan-kegiatan dibidang kehutanan
2. Pembinaan umum dan teknis dibidang kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.
3. Melaksanakan pengawasan peredaran hasil hutan dan sumber daya alam termasuk sarang burung walet
4. Memberikan pelayanan umum dan teknis kepada masyarakat

Dinas Kehutanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menunjang pembangunan dibidang kehutanan yang pantas dilaksanakan demi terjaganya kelestarian hutan. Untuk mencapai supaya terlaksananya yang dimaksud perlu perencanaan jangka menengah yang dituangkan pada Restra tahun 2006 s/d 2010 dan untuk pelaksanaan kegiatannya dibuat Renja (tahun 2007). Renstra dan Renja tersebut dapat dilihat sebagaimana terlampir.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat serta Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2005 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dinyatakan bahwa Pengurusan Kebijakan Teknis, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat memiliki Visi yang sejalan dengan visi pembangunan kehutanan secara umum yaitu : " Terwujudnya kelestarian kawasan dan fungsi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Makna yang terkandung didalam visi diatas adalah :

" kelestarian kawasan dan kelestarian fungsi hutan yang dimaksud adalah pengelolaan hutan melalui system perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan untuk menjamin berkembangnya kapasitas budaya masyarakat, terselenggaranya distribusi manfaat yang berkeadilan, efisiensi dan berkelanjutan serta tahan terhadap perubahan eksternal melalui pendekatan pertisipatif, terpadu, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan visi diatas maka dapat dirumuskan pula 3 misi pembangunan/pengelolaan hutan :

1. Mewujudkan keberadaan kawasan hutan dan fungsinya sebagai aset negara serta memanfaatkannya dengan pengelolaan yang berazaskan kelestarian dan keselarasan dengan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan mutu sumber daya hutan dan lahan melalui usaha konservasi, perlindungan, rehabilitasi dan budi daya.
3. Penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya Aparatur Kehutanan yang tangguh.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi sebagaimana maksud diatas. Dinas Kehutanan melaksanakan dan menjabarkan melalui berbagai misi yang tujuannya :

1. Meningkatkan fungsi dan keberadaan kawasan hutan serta pemanfaatanya dengan pengelolaan yang berazaskan kelestarian dan keselarasan dengan lingkungan hidup
2. Meningkatkan mutu SDH dan lahan melalui usaha konservasi perlindungan, rehabilitasi dan budidaya.

Sasaran yang ingin dicapai :

Pelaksanaan dari penjabaran misi tersebut untuk mencapai terwujudnya visi dimaksud.

C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Fenomena degradasi sumber daya hutan dan lahan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Data pada tahun 2003 mengindikasikan bahwa kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan lebih dari 43 juta hektar dengan laju deforestasi sebesar 1,6 juta s/d 2 juta ha per tahun. Kerusakan hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan bencana alam yang besar, bencana tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar berupa kerusakan infrastruktur, berbagai aset pembangunan serta terganggunya tata kehidupan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan kehutanan di Pasaman Barat meliputi :

- Perencanaan kehutanan terdiri dari : Inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.
- Pengelolaan hutan meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan. Wajib menjaga kekayaan plasma nutfah yang khas.
- Pemerintahan dan masyarakat saling bekerjasama dalam pengawasan di bidang kehutanan.

Sebagai instansi teknis Dinas Kehutanan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di sektor kehutanan yang didasarkan kepada ketentuan teknis baik dari pusat, propinsi ataupun daerah.

- Pemanfaatan Hutan

  Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

- Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan

  Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan yang selektif untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan dapat dilakukan pada hutan lindung dan hutan produksi untuk penggunaan tujuan strategis atau kepentingan umum terbatas.

- Pengelolaan hutan dengan merubah fungsi dan status hutan

  Hanya bisa dilakukan pada areal penggunaan lain (APL), Pada kawasan hutan (HL dan HP) dengan proses pelepasan kawasan oleh Mentri Kehutanan seperti : Kegiatan Pertambangan, Perkebunan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan kehutanan Pasaman Barat serta kaitan dengan program prioritas pembangunan kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah di interpensikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat serta mengimplementasikan kebijakan Propinsi, program – program pembangunan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. **Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

   1.1. Kegiatan :

   1.1.1 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat

   1.1.2 Pembuatan Tanaman Reboisasi

   1.1.3 Pembuatan Bangunan DAM Pengendali

   1.1.4 Pemeliharaan Tegakan Meranti

2. **Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**

   2.1 Kegiatan :

   2.1.1 Penaggulangan Illegal Logging

   2.1.2 Pengamanan dan Penyidikan

3. **Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**

   3.1 Kegiatan :

   3.1.1 Pembinaan Potensi Sumber Daya Hutan

   3.1.2 Identifikasi Potensi SBW

   3.1.3 Pengujian dan Pengendalian Hasil Hutan

4. **Program : Pembinaan Penertiban Hasil Hutan**

   4.1 Kegiatan :

   4.1.1 Sosialisasi Peraturan Mengenai Pengelolaan Hasil Hutan

5. **Program : Perencanaan dan Pengembangan Hutan**

   5.1 Kegiatan :

   5.1.1 Pengukuhan Kawasan Hutan

   5.1.2 Rekontruksi Batas Kawasan Hutan

   5.1.3 Pembuatan Data Base

6 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Honorer

7 **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
Pembangunan Rumah Jabatan
Pembangunan Rumah Dinas
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah Jabatan/Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Sewa Gedung Kantor
Sewa Mess
Sewa Rumah Kadis

8 **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pengadaan Pakaian Korpri
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

9 **Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS**
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
Pemindahan Tugas PNS

10 **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
BINTEK Inplementasi Peraturan Perundang-undangan

11 **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**
Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Matriks Program Indikatif Lima Tahun

Fungsi :
Sub Fungsi :

Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikasi Pembiayaan	Sumber Dana
Peningkatan keberhasilan Rehabilitas,i Reklamasi sistem silvikultur dan Pengelolaan Hutan	Rehabilitasi Mangrove dan Hutan Pantai	- Penanaman seluas 700 ha di kec. Sei Beremas	Rp 1.976.030.000	APBN
	sda	- Penanaman 500 ha	Rp 1.411.015.000	APBN
	sda	- Peningkatan Mangrove seluas 1100 ha	Rp 2.711.000.000	APBN
	sda	- Penanaman Pembibitan, Pengayaan (200 ha)	Rp 135.000.000	APBN
	sda	- Penanaman hutan pantai di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie seluas 300 ha	Rp 84.687.000	APBD II
Jumlah			Rp 6.317.732.000	
Peningkatan keberhasilan Rehabilitasi Reklamasi sistem silvikultur dan Pengelolaan Hutan	Rehabilitasi dan pemuliah cadangan SDA	- U.PM, Pembibitan Penanaman 200 ha	Rp 600.000.000	APBN
	sda	- UPSA, Pembibitan, Penanaman 100 ha	Rp 600.000.000	APBN
	sda	- U.PM, Hutan Rakyat, Pembibitan,Penanaman 500ha	Rp 537.500.000	APBN
	sda	- Pengayaan UPSA 600 ha	Rp 67.500.000	APBN
	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	- Pembuatan hutan rakyat Kecamatan Talamau	Rp 175.000.000	APBD
	sda	- Penanaman di Batas Penjangga (Baperzone) HL. Pasaman Kinali di Plasma 3,4,5 dan Kajai uber ± 300 m, Panjang 50 Km Luas 1500 Ha	Rp 8.500.000.000	APBN
	sda	- Penanaman di Bantaran sungai Batang Pasaman	Rp 4.500.000	
	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	- Sosialisasi Kecil Mananam Dewasa Memanen (KMDM)	Rp 10.000.000	APBD II
	sda	- Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan	Rp 65.000.000	APBD II
Jumlah			Rp 10.559.500.000	
Pemantapan Kawasan Hutan	Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	- Tata batas kawasan hutan HL. Air Bangis (pantai)	Rp 100.000.000	APBN
	sda	- Tata batas kawasan hutan HL Sikabau (Pantai)	Rp 40.200.000	APBN
	sda	- Tata batas kawasan hutan HL. Sikilang (pantai)	Rp 41.025.000	APBN
	sda	- Tata batas kawasan hutan HL. Maligi Sasak	Rp 65.400.000	APBN
	sda	- Orientasi batas kawasan hutan HL. Air Bangis (Batas Fungsi)	Rp 28.200.000	APBN
	sda	- Orientasi batas kawasan hutan HL. Batahan	Rp 40.500.000	APBN
	sda	- Orientasi batas kawasan hutan HL. Silaping	Rp 60.700.000	APBN
	sda	- Orientasi batas kawasan hutan Pasaman	Rp 39.500.000	APBN
	sda	- Inventarisasi batas kawasan hutan HL. Batahan	Rp 50.700.000	APBN
	Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	- Pembuatan buku informasi Kehutanan Kab. PasBar	Rp 40.000.000	APBD
	Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	- Tata Batas antara Kab. Pasaman Barat dengan Kab. Pasaman panjang 25 Km di Sinurut Kec.Talamau	Rp 80.000.000	APBD (2 Kab. Pasaman Barat dan Pasaman)
	Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	- Pemeliharaan dan Pengamanan batas Kawasan HL. Pasaman Kinali di SP 3, 4, 5 kajai Panjang 50 Km	Rp 169.750.000	APBN
Jumlah			Rp 755.975.000	
Penurunn aktivitas ilegal logging	Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam	- Operasi Perlindungan hutan	Rp 383.000.000	APBD I
	sda	- Sosialisasi Kehutanan	Rp 35.000.000	APBN
	Pemantapan keamanan Dalam Negeri	- Operasi pengamanan Terpadu	Rp 79.000.000	APBN
Jumlah			Rp 497.000.000	
Pendukung Kebijakan	Peningkatan tertib Pemanfaatan hasil hutan non kayu	- Identifikasi sarang burung walet kec. G. Tuleh, kec. R Batahan, Kec. Talamau	Rp 25.000.000	APBD
	Peningkatan Kemampuan SDM di bidang kehutanan	- Pelatihan / Kursus ke BUC Siantar Pekanbaru dan Propinsi	Rp 50.000.000	APBD II
		- Pengadaan alat GPS, Kompas - Pelatihan Program Komputer dan Gis ke Jakarta	Rp 29.000.000	APBD II
Jumlah			Rp 104.000.000	

NO	FUNGSI/SUB FUNGSI/BAGIAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN TAHUN 2007	INDIKASI PAGU ANGGARAN		
				ALOKASI Th. 2006	ALOKASI Th. 2007	ALOKASI Th. 2008
					Rp 4.089.579.000	
	Fungsi :				Rp 533.400.000	
	Sub Fungsi :					
1	Program :	Out Came :				
	Perencanaan dan pengembangan hutan	* Terukurnya batas kawasan hutan 95 Km				
		* Terorientasinya batas kawasan				
		hutan 93,5 Km				
		* Tersedianya data base kehutanan 100 buku				
	Kegiatan Kerangka Anggaran :					
	* Pengukuran kawasan hutan	Out put :	* Hutan Lindung pantai Air Bangis sepanjang 40 Km		Rp 110.000.000	
		Jelasnya batas kawasan hutan sepanjang 95 Km	* Hutan Lindung pantai Katiagan sepanjang 25 Km		Rp 80.000.000	
			* Hutan Lindung pantai Mandiangan sepanjang 30 Km		Rp 90.000.000	
	* Orientasi hutan lindung Batahan	Out Put :	* Hutan lindung pantai Batahan sepanjang 93,5 Km		Rp 48.000.000	
		Tersedianya data batas kawasan hutan sepan-				
		jang 93,5 Km				
	* Tata batas antara Kab. Pasbar dgn kab.	Out Put :				
	Pasaman	Jelasnya batas antar kabupaten sepanjang 25 Km	Kec. Talamau dengan Kec. Duo Koto		Rp 80.000.000	
	* Penyusunan data base kehutanan	Out Put :				
		Tersusunnya data base kehutanan 100 buku	Data-data mengenai potensi Dinas Kehutanan		Rp 30.000.000	Rp 10.000.000
2	Program :	Out Come :			Rp 47.700.000	
	Pembinaan dan penertiban industri hasil	Tertipnya izin Industri hasil hutan sebanyak 100 unit				
	hutan					
	Kegiatan Kerangka Anggaran :	Out Put :				
	* Sosialisasi peraturan bidang kehutanan	Paham dan mengertinya pengusaha-pengusaha	Pengusaha pengelola industri hasil hutan		Rp 47.700.000	
		industri hasil hutan untuk urusan izin				
	Fungsi :					
	Sub Fungsi :					
3	Program :	Out Came :			Rp 1.039.629.000	
	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Tertibnya pengolahan hutan				
	Kegiatan :					
	Pengembangan hasil hutan non kayu	Out Put :	* Goa Rantau Paku	Rp 300.600.000	Rp 202.334.000	
	* Pembinaan potensi SBW	Meningkatnya populasi burung walet sehingga jum-	* Goa Karang Putih			
		lah sarang bertambah				
	* Pendirian bangunan SBW	Out Put :	* Air Bangis Kec. Sei Beremas	Rp 270.000.000	Rp 600.000.000	
		Bertambahnya jumlah penangkar SBW dan mening-				
		katnya pengetahuan penagkar SBW dalam menge-				
		lola usahanya				

	* Identifikasi potensi SBW	Out Put :	* Rura patontang	Rp 33.700.000	Rp 43.095.000	
		Bertambahnya jumlah goa alam yg ditempati SBW	* Talang Kuning			
		sehingga dapat dikelola secara ekonomis	* Bangunan			
	Kegiatan :	Out Put :	Industri penggergajian kayu saw mill (3000 org)		Rp 65.250.000	
	* Sosialisasi peraturan perizinan kehutanan	* Tersosialisasinya UU dan peraturan ttg kehutanan				
	* Pengujian dan pengendalian PHH	* Jelasnya Jenis dan Jumlah Hasil Hutan	Penertiban Gergaji Rantai Chan Saw (100 kasus)		Rp 127.950.000	
4	Program :					
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Out Came			Rp 1.718.575.000	
		- Terciptanya Masyarakat akan Pentingnya				
	Kegiatan	Fungsi Pengelolaan Hutan Yang Lestari				
	- Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	Out Put :	Lahan Kritis	Rp 443.230.000	Rp 770.000.000	
	- Pembuatan Tanaman Reboisasi	Terehabilitasinya Lahan Kritis	Lahan Kritis	Rp 974.025.000	Rp 385.000.000	
	- Pembuatan Bangunan Dam Pengendali		Lahan Kritis		Rp 450.000.000	
	- Pembuatan Tegakan Benih Meranti		Lahan Kritis		Rp 113.575.000	
5	Program :	Out Came:				
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terjaganya Kelestarian Sumber Daya Alam			Rp 751.275.000	
	Kegiatan :	Out Put :				
	- Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kerusakan Hutan	Pahamnya Masy. Tentang Perlindungan & Kelestarian Hutan	Masy. Disekitar Hutan 440 org		Rp 77.880.000	
	- Penaggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlindungnya Kawasan Hutan	Pembangunan Menara Pengawasan Kehutanan		Rp 100.790.000	
	- Penaggulangan Illegal Logging	Pahamnya Masy. Tentang Kerusakan Hutan	Masy. & Badan Usaha Illegal 50 Kasus		Rp 125.000.000	
	- Pengamanan dan Penyidikan	Pahamnya Masy. Tentang Perlindungan & Kelestarian Hutan	Masyarakat dan Badan Usaha Illegal Logging 100 kasus		Rp 447.605.000	

Simpang Empat, Oktober 2006

Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat

Drs. H. Kofdinal Yefri
NIP. 710 019 855

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan dari perencanaan – perencanaan yang terdapat dalam Renstra ini diharapkan terlaksana sesuai dengan yang di harapkan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan komitmen untuk terwujudnya pembangunan di bidang kehutanan untuk mencapai kesejahteraan masayarakat. Hasil akhir yang diharapkan dalam penyusunan RENSTRA ini adalah :

1. Sebagai landasan dasar dalam pembangunan / pengelolaan di bidang kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Melindungi keberadaan kawasan hutan dan fungsinya sebagai aset negara serta memanfaatkannya dengan pengelolaan yang berazaskan kelestarian dan keselarasan dengan lingkungan hidup.
3. Memberikan andil yang nyata terhadap pembangunan Pasaman Barat, dengan titik berat ikut mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan.